

Implementasi Kebijakan PSBB di Kota Probolinggo Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/561/Kpts/013/2021 Tahun 2021

Imam Sucahyo¹, Siti Nur Fadilah², M. Hasan Akbar³, Ervito Setya Pratama⁴, M. Andrian P E⁵, M. Eko Danianto⁶

123456 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik-Universitas Panca Marga Probolinggo

Article Info

Article history:

Accepted: 26 January 2023

Publish: 02 March 2023

Keywords:

Covid-19

PSBB

Policy

Article Info

Article history:

Diterima: 26 Januari 2023

Publish: 02 Maret 2023

Abstrak

Coronavirus disease (covid-19) has hit the whole world, including Indonesia. There have been efforts to break the chain of Covid-19 in various ways, one of which is called Large-Scale Social Restrictions (PSBB). The purpose of this study is to measure the conformity of regulations with the implementation of these regulations. The results of the study show that the implementation of Large-Scale Social Restrictions is sufficient to help control the spread of the covid-19 chain. The focus of this study is related to the field of education where there are still many problems experienced during learning.

Abstrak

Penyakit coronavirus (covid-19) melanda seluruh dunia, tanpa terkecuali Indonesia. Keputusan mata rantai covid-19 telah diupayakan dengan berbagai cara, salah satunya disebut dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Tujuan dari penelitian ini, mengukur kesesuaian peraturan dengan implementasi peraturan tersebut. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar cukup membantu pengendalian persebaran mata rantai covid-19. Fokus kajian ini terkait bidang pendidikan dengan kondisi masih banyak problematika yang dialami.

This is an open access article under the [Lisensi Creative Commons Atribusi-Berbagi Serupa 4.0 Internasional](#)



Corresponding Author:

Siti Nur Fadilah

Universitas Panca Marga Probolinggo

Email: dhiilove01@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Total kematian disebabkan oleh penyakit coronavirus sejak April 2020 sejumlah 150.000 (seratus lima puluh ribu) serta ditetapkan lebih dari 200 negara dunia memiliki kasus yang sama seperti di kota Wuhan. China menjadi negara pertama yang terdampak penyakit coronavirus dan mulai terjangkit di akhir tahun 2019. Belum teridentifikasi secara gamblang penyebab awal penyakit tersebut, dengan dampak yang disebabkan sangat serius (World Health Organization, 2020).

Peristiwa langka ini sangat mengancam kehidupan manusia di segala aktivitas peradaban, yang persebarannya tanpa terkecuali di seluruh dunia. Dipastikan WHO pada 11 Maret 2020, bahwa peristiwa ini dikukuhkan sebagai pandemi secara menyeluruh yang memaksa pemerintah setempat secepatnya merekonstruksi kebijakan-kebijakan guna memangkas mata rantai persebaran virus (Nurhayati & Halal, 2020).

Kondisi kian hari semakin tidak membaik, dampak dari persebaran virus ini khususnya di Indonesia. Mendesak pemerintah pusat memutuskan bahwa peristiwa ini sebagai bencana atau wabah yang perlu diatasi sesegera mungkin, guna menghentikan persebarannya (Thorik, 2020). Berbagai hal upaya tengah digencarkan pemerintah sebagai proses pengurangan persebaran dan meminimalisir dampak buruk yang timbul akibat virus ini. Pemerintah fokus melakukan peningkatan pelayanan dari segi medis, tidak lain menambah kapasitas tenaga medis, kesediaan obat-obatan penunjang, serta peralatan penunjang yang berfungsi sebagai pemutus mata rantai persebaran virus. (Yunus & Rezki, 2020).

Sebagai upaya pemutus mata rantai persebaran virus, pemerintah menggagas suatu kebijakan akan pembatasan interaksi sosial diantara warga. Kebijakan ini disebut dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), yang merupakan kebijakan dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan (Departemen Kesehatan) bertujuan untuk menangani peningkatan coronavirus. Kebijakan ini telah diatur dalam perundangan Indonesia yakni Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020.

Kebijakan yang berlaku ini berdasar pada Peraturan Presiden No.21 Tahun 2020 terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar. Dalam kondisi seperti ini sangat dibutuhkan koordinasi serta kerjasama diantara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat sebagai sentral segala kebijakan, terkait perihal teknis kebijakan yang akan diterapkan di daerah-daerah agar tepat dan tidak bertolak belakang dengan pemerintah pusat (Ristyawati, 2020).

Banyak dari warga yang merasa tertekan dengan adanya pembatasan sosial ini, terutama bagi kaum menengah kebawah yang notabene pekerjaan mereka berada di lapangan. Pembatasan ini terasa sangat memukul bagi warga, tidak lain aktivitas sosial yang setiap harinya dilakukan secara langsung, kini hal tersebut harus dialihkan melalui sosial media yang tersedia. kondisi yang mencekam ini memiliki tingkat krusial yang sangat tinggi, di tengah kondisi banyak warga yang terjangkit dan ditambah dengan pengehentian mobilitas warga, dirasa tingkat kejahatan juga semakin naik. Tidak lain disebabkan warga yang pekerjaan secara teknis lapangan tidak memiliki penghasilan cukup untuk mencukupi kebutuhan yang tiap harinya tidak semakin berkurang. Terpampang kondisi demikian pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkoordinasi mensebarluaskan informasi-informasi yang berguna dalam rangka mengatasi kepanikan yang sedang terjadi di masyarakat sekitar (Yunus & Rezki, 2020)

Gambaran daripada ulasan bab sebelumnya menjadikan pengkaji tertarik memperdalam kebijakan seperti apakah yang tepat diimplementasikan di kondisi yang genting. Teori daripada kajian ini berdasar pada Meter dan Horn, yang mendeskripsikan bahwa suatu kebijakan yang dibuat pemerintah merupakan aktivitas daripada sekumpulan orang (organisasi public) merancang dan menetapkan suatu kebijakan guna mencapai tujuan utama dengan ditetapkannya keputusan sebelumnya, sebagai keputusan yang direalisasikan kedalam Tindakan yang nyata (Marwiyah dkk, 2021). Dasar pemilihan lokasi, pengkaji melihat bahwa Probolinggo sebagai salah satu daerah di Jawa Timur yang memiliki informasi penanganan penyakit coronavirus lebih terkendali daripada kota lain di Jawa Timur.

2. METODE PENELITIAN

Kajian ini memilih kualitatif deskriptif sebagai metode kajian. Kajian ini akan menggambarkan serta mendeskripsikan suatu objek dengan langsung sesuai kondisi yang terjadi. Dilakukan dengan pendekatan seperti dokumentasi dan observasi serta media lainya seperti berita

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dye (Islamy, 1994) mengungkapkan bahwa kebijakan public “whatever governments choose to do or not to do” yang diartikan sebagai respon pemerintah terhadap problematika publik yang sedang terjadi. Anderson (2006), menyatakan sebagai tindakan badan dan pejabat public terhadap isu-isu public dengan mengadakan kebijakan dan atau mengembangkan kebijakan tersebut.

Pemerintah Republik Indonesia memutuskan putusan penanganan coronavirus yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020. Perealisasi putusan tersebut tepat di Jakarta pada 10 April 2020. Kondisi yang berubah-ubah menjadikan kebijakan-kebijakan yang dibuat sering terjadi pergantian.

Regulasi lain yang mengatur PSBB yaitu Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019. Sedangkan Pemerintah Daerah ditentukan sendiri tetap berdasar peraturan pemerintah pusat sebagai acuan, tak terkecuali Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur yang diatur dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/561/KPTS/013/2021 Tahun 2021.

Pembatasan mobilitas sosial warga dalam aktivitas sehari-hari guna menangani persebaran virus secara menyeluruh dalam tingkatan global. Indikator pengimplementasian program ini berfokus pada mobilitas warga di beberapa tempat yang memiliki tingkat kerumunan tinggi. Normalnya program pembatasan mobilitas warga ini berlangsung selama 14 hari terhitung dari munculnya kasus yang terjangkit virus tersebut. Hal ini tidak lain berlangsung dalam kegiatan belajar mengajar, sebab tingkat kerumunan yang ditimbulkan banyak dan berdasarkan pengamatan masa nya tergolong rentan.

Sekalipun demikian tidak semua sekolah memutuskan kegiatan belajar mengajar anak-anak secara online. Masih ditemukan beberapa sekolah yang kegiatan belajar mengajar dilaksanakan tatap langsung tetapi dengan penerapan protocol Kesehatan yang ketat. Pengimplementasian putusan kebijakan di setiap daerah berbeda-beda, dikarenakan setiap daerah memiliki otoritas sendiri bagi daerahnya dalam menetapkan keputusan.

Putusan pemerintah mengenai pembelajaran efektif secara daring diberlakukan pada tanggal 16 Maret 2020, yang mulai berlaku efektif di daerah-daerah provinsi. Pada realisasinya tidak semua dapat mengimbangi kebijakan yang telah dibuat tersebut, dikarenakan di daerah tertentu fasilitas untuk pembelajaran secara daring, dimana peralatan yang dibutuhkan seperti laptop, computer dan handphone belum tersedia.

Program ini bagi sebagian warga pedukuhan menjadi dampak buruk, sebab kebiasaan warga yang dilakukan setiap harinya secara bebas kini sangat terbatas, hingga menimbulkan kepanikan mendadak (sudden panic). Disisi lain warga juga banyak yang mendukung adanya program ini, demi menuntaskan persebaran virus yang kian hari semakin meningkat. Tidak dipungkiri program ini juga sebagai suatu solusi yang paling berimbang yang disarankan pemerintah.

4. KESIMPULAN

Penerapan PSBB di kota Probolinggo sesuai hasil rapat penilaian PSBB, dengan memperhatikan aspirasi masyarakat serta aparat penegak hukum. Meski kesadaran masyarakat cukup tinggi, ada juga kelompok atau beberapa orang yang tidak sadar. Karena penularan covid 19 masih berlangsung, ini harus menjadi perhatian. Serta terus menghimbau kepada masyarakat untuk melakukan social distancing, memakai masker dan sering mencuci tangan dalam rangka penerapan protokol kesehatan. Untuk itu, pemerintah akan memperketat aturan di masyarakat, khususnya terkait penerapan protokol kesehatan.

Hal ini guna menekan angka positif di Kota Probolinggo. di Kelurahan pilang sendiri Pembatasan Skala Besar ini membuat membuat kepanikan dan keresahan di masyarakat saat awal kebijakannya dikeluarkan oleh pemerintah. Penurunan pendapatan masyarakat yang menurun drastis ditambah kebijakan kebijakan yang menghancurkan golongan masyarakat agar Stay Home ini sangat dirasakan salah satunya di bidang Pendidikan dan perekonomian. Masyarakat dituntut agar bisa membiasakan diri dalam situasi ini demi tercapainya tujuan negara terhadap penurunan kasus Covid 19 ini.

5. DAFTAR PUSTAKA

“Arti PSBB yang Dibuat untuk Cegah Penyebaran Corona di Indonesia.” <https://tirto.id/arti-psbb-yang-dibuatuntukcegah-penyebaran-corona-diindonesiaeMXT> (accessed Nov. 12, 2021).
D. Herdiana, A. Negara, S. Tinggi, I. Administrasi, (Stia, and) Cimahi, “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBATAAN SOSIAL BERSKALA BESAR (PSBB) SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19),” DECISION: Jurnal Administrasi Publik, vol. 2, no. 2, Sep. 2020, doi: 0.23969/DECISION.V2I2.2978.

“Kementerian Komunikasi dan Informatika.” https://kominfo.go.id/content/detail/32189/usulan-psbb-bisa-jadi-solusi-covid-19permenkes-no-9-aturtatacaranya/0/artikel_gpr (accessed Des. 23, 2022).

“PPKM Darurat, Sejumlah Jalan di Probolinggo Ditutup, Akses ke Situbondo Dialihkan ke

JalurUtara - Tribunjatim.com.”

“Teori Kebijakan Publik Menurut Para Ahli - Jasa Pembuatan Skripsi dan Tesis 0813-3339-9825 (WA).” <https://idtesis.com/teori-kebijakan-publikmenurut-para-ahli/> (accessed Nov. 25, 2021).

<https://jatim.tribunnews.com/2021/07/08/ppkm-darurat-sejumlah-jalandiprobolinggoditutup-akseskesitubondodialihkan-ke-jalurutara> (accessed Des. 22,2022).

R. Naditya, “Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah (Suatu Studi di Dinas Kebersihan dan Pertamanan ...,” *Jurnal Administrasi Publik*, 2013.

R. Segreto et al., “Should we discount the laboratory origin of COVID-19?,” *Environmental Chemistry Letters*, vol. 19, no. 4, pp. 2743–2757, Aug. 2021, doi: 10.1007/S10311-021-01211-0.